



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 122 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi agar dapat memberikan arahan yang jelas terkait implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Padang Pariaman;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);





9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam implementasi reformasi birokrasi baik general maupun tematik.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 6 Maret 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
SUHATRI BUR

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 122 /KEP/BPP/2024  
TANGGAL 6 MARET 2024  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

a. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General

Reformasi Birokrasi General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General berfokus pada 21 kegiatan utama yang menjadi *mandatory*, antara lain:

1. Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja *agile*;
2. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN;
3. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional;
4. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi;
5. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital;
6. Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja;
7. Penguatan Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
8. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
9. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi;
10. Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik;
11. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Pelaksanaan Arsip Digital;
13. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral;
14. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
15. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
16. Penguatan Jabatan Fungsional;
17. Pelaksanaan *Core Values* ASN;
18. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima;
19. Penguatan Sistem Merit;
20. Pelaksanaan *Core Values* ASN;
21. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima.

Kegiatan utama memiliki indikator dengan target yang terukur dan relevan. Aksi pencapaian target Kegiatan Utama dituangkan dalam Rencana Aksi yang jelas dan terukur sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:





TABEL 1. RENCANA AKSI REFORMASI BIRUKRASI GENERAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2024	NO	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Setoran	
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total		Koordinator	Pelaksana
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model berbasis bagi Pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyelenggaraan Daerah	2.5	1.	Percepatan Proses Penetapan Dokumen Kebijakan Sistem Kerja	Dokumen	Jumlah Dokumen Ranperbup Sistem Kerja	-	-	-	1	1	0	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan Tim Perumus
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Infra SPBE	3.12	1.	Menyusun Arsitektur SPBE to-be dalam SIA berdasarkan SPBE SIA versi 2	Arsitektur	Jumlah Arsitektur SPBE	-	-	2	-	2	Rp. 1.353.875.175	Dikominfo	Kemampuan RI dan Dikominfo
	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE NIS SAKIP	2.5	1.	Implementasi Arsitektur SPBE SIA Versi 2	Persentase (%)	Persentase kebijakan arsitektur SPBE yang diimplementasikan	-	-	-	25	25	Rp. 1.353.875.175	Dikominfo	Dikominfo
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi		72	1.	Pengumpulan Pohon Kinerja Perangkat Daerah	OPD	Jumlah OPD yang disempurnakan dokumen pohon kerjanya	43	-	-	-	43	Rp. 50.000.000	Bepelbangla	Seluruh Unit Kerja
			2.	Membuat Surat Pengiutuan data ANP ke dalam Aplikasi SIMAK Kinerja	Burat	Jumlah Surat Edaran Pemasangan Aplikasi SIMAK Kinerja	1	1	1	1	4	0	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
			3.	Memberikan Paraf Verifikasi terkait kelengkapan dokumen perencanaan dengan Perjanjian Kinerja secara berjenjang dari Bepelbangla, Inspektorat dan Bagian Organisasi	OPD	Jumlah Perkin OPD yang diberikan paraf verifikasi	43	-	-	-	43	0	Bepelbangla, Inspektorat dan Bagian Organisasi	Bepelbangla, Inspektorat dan Bagian Organisasi
			4.	Melakukan verifikasi dan memberikan catatan perbaikan terhadap LKIP Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen LKIP OPD yang di verifikasi	43	-	-	-	43	0	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi
			5.	Melakukan Reriviu Dokumen LKIP Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen LKIP Perangkat Daerah yang direviu	43	-	-	-	43	0	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
			6.	Penyusunan Flowchart untuk Pengembangan Aplikasi e-SAKIP (SIMAK Kinerja) Kabupaten Padang Pariaman	Data Flowchart	Jumlah data Flowchart Pengembangan Aplikasi e-SAKIP (SIMAK Kinerja) Kabupaten Padang Pariaman	1	-	-	-	1	0	Bagian Organisasi, Inspektorat	Bagian Organisasi
			7.	Pemantauan penginputan data realisasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah Triwulan III dan IV Tahun 2023 ke dalam Aplikasi Simak Kinerja	OPD	Jumlah OPD yang dipantau	43	-	-	-	43	Rp. 2.000.000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
			8.	Pemantauan penginputan data realisasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah Triwulan I Tahun 2024 ke dalam Aplikasi Simak Kinerja	OPD	Jumlah OPD yang dipantau	-	43	-	-	43	Rp. 2.000.000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	2.5	1.	Pemantauan pembangunan ZI di RSUD Padang Pariaman dan Puskesmas Sidicin	Laporan	Jumlah Laporan pembangunan ZI	-	-	1	-	1	0	Inspektorat	RSUD Padang Pariaman dan Puskesmas Sidicin
			2.	Pendampingan pembangunan ZI di RSUD Padang Pariaman dan Puskesmas Sidicin	Laporan	Jumlah Laporan pembangunan ZI	-	-	1	-	1	0	Inspektorat	RSUD Padang Pariaman dan Puskesmas Sidicin
			3.	Penemuan dokumen ZI RSUD Padang Pariaman dan Puskesmas Sidicin	Laporan	Jumlah Laporan penemuan dokumen	-	-	-	1	1	Rp. 1.775.000	Inspektorat	RSUD Padang Pariaman dan Puskesmas Sidicin
			4.	Evaluasi dokumen ZI RSUD Padang Pariaman dan Puskesmas Sidicin	Laporan	Jumlah Laporan evaluasi dokumen	-	-	-	1	1	Rp. 1.775.000	Inspektorat	RSUD Padang Pariaman dan Puskesmas Sidicin
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPI)	Tingkat Maturitas SPI	3.00	1.	Pengumpulan dokumen yang sudah dibuat tahun sebelumnya meliputi Kebijakan SPI, Register Risiko Tahun 2023, RTP tahun 2023 dan Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPI Perwakilan BPPD	Laporan	Jumlah Laporan pengumpulan data	1	-	-	-	1	0	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
			2.	Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk memetakan risiko dan menyusun MIP Tahun 2023 dengan mempertakan Satgas SPI Perwakilan dan wakil dari masing-masing PD	Laporan	Jumlah Laporan FGD	1	-	-	-	1	0	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2024	NO	Rencana Aksi	Output		Target Pengiraan					Jumlah Anggaran	Unit / Satuan	
					Setuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total		Koordinator	Pelaksana
			3	Evaluasi dokumen SIPP kesuruh PD Kabupaten Padang Pariaman	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi SIPP kesuruh PD	-	-	1	-	1	0	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
			4	Evaluasi dan pemutakhiran atas Register Risiko PD	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pemutakhiran RR PD	-	1	-	-	1	0	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
			5	Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2023	Laporan	Jumlah Laporan RTP	-	-	1	-	1	0	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
			6	Melakukan pematanaan SIPP	Laporan	Jumlah laporan pematanaan SIPP	-	-	1	-	1	0	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
			7	Melakukan monitoring dan evaluasi SIPP	Laporan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi SIPP	-	-	-	1	1	Rp. 15.850.000	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	5	1.	Revisi Penetapan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen Penetapan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat	-	-	1	-	1	0	Dikomininfo	Dikomininfo
			2.	Upgrade Admin Perangkat Daerah pengelola pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR!	OPD	Jumlah admin Perangkat Daerah pengelola pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR!	-	-	44	-	44		Dikomininfo	Seluruh Unit Kerja
			3.	Bimbingan Teknis Pengelolaan SP4N LAPOR!	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan SP4N LAPOR!	-	1	1	-	2	Rp. 40.000.000	Dikomininfo	Dikomininfo
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	83	1.	Sosialisasi hasil SPI Tahun 2023	Kegiatan	Jumlah kegiatan sosialisasi hasil SPI tahun 2023	-	1	-	-	1	0	Inspektorat	Inspektorat
			2.	Sosialisasi antikorupsi dan upaya Pencegahan korupsi kepada seluruh stakeholder internal (termasuk responden SPI internal)	Laporan	Jumlah Laporan Sosialisasi	-	1	-	-	1	0	Inspektorat	Inspektorat
			3.	Sosialisasi antikorupsi dan upaya Pencegahan korupsi kepada seluruh stakeholder eksternal termasuk ekaper (responden SPI eksternal)	Laporan	Jumlah Laporan Sosialisasi	-	1	-	-	1	0	Inspektorat	Inspektorat
			4.	Menyelenggarakan rapat koordinasi pematanaan MCP setiap triwulan sekali dalam rangka pematanaan upaya pencegahan korupsi daerah. Inspektorat melakukan quality assurance terhadap dokumen kelengkapan MCP sebelum diinput dalam JAGAD	Kegiatan	Jumlah rapat koordinasi	-	1	1	1	3	0	Inspektorat	Inspektorat
			5.	Pematanaan terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat baik yang dikelola inspektorat sendiri maupun yang dikelola oleh OPD lain	Laporan	Jumlah laporan pematanaan	-	1	1	1	3	0	Inspektorat	Inspektorat
			6.	Pematanaan Pakta Integritas dan Komitmen Antikorupsi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Eselon I, II, dan III disalurkan baik stakeholder internal maupun eksternal Pemda	Dokumen	Jumlah Dokumen Pakta Integritas dan Komitmen Anti Korupsi	-	1	-	-	1	0	Inspektorat	Inspektorat
			7.	Melaksanakan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024	Laporan	Jumlah Laporan hasil survei penilaian integritas	-	-	-	1	1	0	Inspektorat	Inspektorat
Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	65	1.	Berkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) terkait skema dan pola evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan	Kegiatan	Jumlah Kegiatan koordinasi terkait skema dan pola evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan	-	1	-	-	1	0	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
			2.	Pembentukan enumerasi IKK	Dokumen	Jumlah dokumen pembentukan enumerasi IKK	-	1	-	-	1	0	bagian Organisasi dan Bagian Hukum	Bagian Organisasi
			3.	Pelaksanaan Evaluasi Mandiri Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2024	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Mandiri Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2024	-	-	-	1	1	-	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja Terkait
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Reformasi Hukum	70	1.	Melakukan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ke Kemenkumham	Dokumen	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang di Harmonisasi	8	5	5	3	21	Rp. 20.000.000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
			2.	Melaksanakan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	Surat Keputusan DPRD dan Surat Keputusan Bupati	2	-	-	-	2	Rp. 20.000.000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
			3.	Melakukan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terintegrasi Sesuai Dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	Dokumen	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang di Upload	2	20	40	40	102	Rp. 50.000.000,00	Bagian Hukum	Bagian Hukum



Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2024	NO	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Sehman	
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total		Koordinator	Pelaksana
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	100	1.	Penyusunan SK Admin Srikandi Versi 3 OPD	Dokumen	Jumlah SK Pembentukan Grup Admin Srikandi Versi 3 OPD	-	1	-	-	1	0	Dia. Arsip dan Perpustakaan	Dia. Arsip dan Perpustakaan
			2.	Melakukan Sosialisasi Srikandi Versi 3 melalui aplikasi Zoom	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Srikandi melalui aplikasi Zoom	-	1	-	-	1	0	Dia. Arsip & Perpustakaan dan Diskominfo	Seluruh Unit Kerja
			3.	Membuka Pelayanan Konsultasi Lanjutan mengenai Implementasi Aplikasi SRIKANDI Versi 3	OPD	Jumlah OPD yang terlayani konsultasi lanjutan Aplikasi SRIKANDI Versi 3	3	7	15	18	43	0	Dia. Arsip & Perpustakaan dan Diskominfo	Seluruh Unit Kerja
			4.	Melakukan Pendampingan Implementasi Srikandi Versi 3 ke semua admin dan Kepala OPD	Kegiatan	Jumlah admin dan Kepala OPD yang didampingi	-	13	15	15	43	0	Dia. Arsip, Diskominfo	Seluruh Unit Kerja
			5.	Sosialisasi Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip sesuai Permendagri Nomor 83 Tahun 2022	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip	1	1	-	-	2	0	Dia. Arsip & Perpustakaan	Seluruh Unit Kerja
			6.	Penyusunan rancangan peraturan bupati tentang implementasi e-Arsip	Dokumen	Jumlah dokumen rancangan peraturan bupati tentang implementasi e-Arsip yang disusun	-	-	-	1	1	0	Dia. Arsip & Perpustakaan	Dia. Arsip & Perpustakaan dan Bagian Hukum
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	3	1.	Menyusun rencana kerja dan membentuk Tim	Dokumen	Jumlah Dokumen SK Tim yang tersusun	-	-	1	-	1	Rp. 2.500.000	Diskominfo	Diskominfo
			2.	Mengidentifikasi kebutuhan data-data statistik sektoral OPD	OPD	Jumlah OPD yang membutuhkan data-data statistik	-	27	-	-	27	Rp. 2.500.000	Diskominfo	Diskominfo
			3.	Menghimpun data-data untuk kebutuhan penyusunan data statistik sektoral OPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Data Statistik	-	27	-	-	27	Rp. 2.500.000	Diskominfo	Diskominfo
			4.	Melakukan penyusunan buku data statistik sektoral	Buku	Jumlah Buku Kabupaten Dalam Angka dan PDRB	-	2	-	-	2	Rp. 2.500.000	Diskominfo	Diskominfo
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	78	1.	Pelaksanaan Pemanfaatan Sistem Pengadaan Melalui Aplikasi SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing, Non E-Purchasing	%	Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan	10	20	25	45	100	Rp. 10.000.000	Bagian PBJ	Bagian PBJ
			2.	Terpapanya SDM PBJ yang berkualitas dan Kompeten dengan melaksanakan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	50	10	5	65	Rp. 25.000.000	Bagian PBJ	Bagian PBJ
			3.	Terpapanya tingkat kematangan UOPBJ	Tingkat Kematangan	Levit Proaktiv	-	-	-	9	9	Rp. 5.000.000	Bagian PBJ	Bagian PBJ
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	1.	Koordinasi dan Penyusunan peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1	1	1	1	4	Rp. 1.282.272.000	BPKD	Sidang Anggaran BPKD
			2.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-	-	-	1	1	Rp. 124.222.000,00	BPKD	Sidang Perbendaharaan BPKD
			3.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-	46	-	-	46	Rp. 75.434.000,00	BPKD	Sidang Akutansi BPKD
			4.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pemindehtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindehtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2	1	1	3	7	Rp. 69.010.000,00	BPKD	Sidang Aset BPKD
			5.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah	-	-	-	1	1	Rp. 26.420.000,00	BPKD	Sidang Pendataan
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	80	1.	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan: Serilah BPK RI dan/atau APJP melakukan pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada perangkat	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	1	-	-	-	1	0	Inspektorat	Sekretariat Inspektorat
			2.	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut: Setelah menerima laporan hasil pemeriksaan, perangkat daerah bersama dengan Inspektorat Daerah akan menyusun rencana tindak lanjut sebagai respon terhadap temuan dan rekomendasi yang diungkapkan dalam laporan	Dokumen	Jumlah dokumen rencana tindak lanjut	1	-	-	-	1	0	Inspektorat	Sekretariat Inspektorat

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2024	NO	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan	
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total		Koordinator	Pelaksana
			3	Implementasi Tindak Lanjut: Perangkat Daerah akan melakukan implementasi tindak lanjut sesuai dengan rencana yang telah disusun. Langkah-langkah perbaikan akan dijalankan untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi dan meringkaskan	Dokumen	Jumlah dokumen implementasi tindak lanjut	-	1	1	1	3	Rp. 15.000.000,00	Inspektoral	Sekretariat Inspektoral
			4	Monitoring dan Evaluasi: Setelah tindak lanjut dilaksanakan, Inspektoral Daerah akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan telah dilaksanakan dengan baik	Laporan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi	-	1	1	1	3	Rp. 15.000.000,00	Inspektoral	Sekretariat Inspektoral
Penguatan Sistem Merit Integrasi Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Manajemen Talenta ASN dan Penataan Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit	250	1.	Penataan dan Pergeseran Formasi jabatan fungsional yang kosong sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan	%	Persentase Formasi Jabatan Fungsional yang Terisi	-	-	90	-	90	Rp. 11.320.500	BKPSDM	BKPSDM
			2.	Memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi pemangku jabatan fungsional	%	Persentase pemangku jabatan fungsional yang telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi	-	-	90	-	90	Rp. 11.320.500	BKPSDM	BKPSDM
			3.	Menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi	-	-	-	1	1	Rp. 3.205.500	BKPSDM	BKPSDM
			4.	Menempatkan JPT sesuai dengan kompetensi	%	Persentase penempatan JPT sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	-	-	-	100	100	Rp. 10.000.000	BKPSDM	BKPSDM
			5.	Sosialisasi Aspek Penilaian Kinerja Pegawai Kepada Seluruh OPD	OPD	Jumlah OPD yang mendapatkan sosialisasi penilaian kinerja pegawai	44	-	-	-	44	Rp. 10.410.900	BKPSDM	BKPSDM
			6.	Pemanfaatan Aplikasi dalam Pelaporan Kinerja Harian ASN	%	Persentase ASN yang memanfaatkan aplikasi dalam pelaporan kinerja harian	100	-	-	-	100	0	BKPSDM	Seluruh ASN
			7.	Pemberian reward kepada ASN berdasarkan hasil evaluasi kinerja	%	Persentase ASN yang mendapatkan reward berdasarkan hasil evaluasi kinerja	100	-	-	-	100	Rp. 10.000.000	BKPSDM	BKPSDM
			8.	Pemberian punishment kepada ASN berdasarkan hasil evaluasi kinerja	%	Persentase ASN yang mendapatkan punishment berdasarkan hasil evaluasi kinerja	100	-	-	-	100	Rp. 10.000.000	BKPSDM	BKPSDM
			9.	Melanjutkan penyusunan SK/	Dokumen	Jumlah dokumen yang mengacu kepada aturan ASN	-	-	-	1	1	Rp. 1.000.000	BKPSDM	BKPSDM
			10.	Melanjutkan asesmen kompetensi agar lebih banyak pegawai yang terpetakan profil kompetensinya	Dokumen	Jumlah dokumen asesmen pegawai yang akan mengikuti kompetensi	-	-	-	1	1	Rp. 3.050.000	BKPSDM	BKPSDM
			11.	Memulai pemetaan pegawai ke dalam talent pool dan rencana sukarela sesuai dengan ketentuan nasional	Dokumen	Jumlah dokumen dan yang mengikuti talent pool	-	1	-	-	1	Rp. 13.160.500	BKPSDM	BKPSDM
			12.	Menyusun rencana kebutuhan pengembangan pegawai baik metode klasikal maupun nonklasikal berdasarkan hasil analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai	Dokumen	Jumlah dokumen kebutuhan dan yang mengikuti edat	-	-	-	1	1	0	BKPSDM	BKPSDM
			13.	Melaksanakan promosi ke Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dengan berdasarkan pada pertimbangan kompetensi hasil asesmen atau uji kompetensi dan penilaian kinerja	Dokumen	Jumlah dokumen dan yang dipromosi ke jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas	-	-	-	1	1	Rp. 19.500.100	BKPSDM	BKPSDM



Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2024	NO	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan	
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total		Koordinator	Pelaksana
			14.	Mengidentifikasi pegawai dengan kinerja bermasalah dalam penantian kinerja, melakukan pembinaan bagi pegawai dengan kinerja bermasalah	Dokumen	Jumlah dokumen identifikasi pegawai yang bermasalah	-	-	-	1	1	Rp. 1.000.000	BKPSDM	BKPSDM
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	60	1.	Pembuatan Buku Panduan dan videografi implementasi Core Values ASN BerAKHLAK	Buku dan video	Jumlah Buku dan Video Panduan Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK	-	1	-	-	1	0	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
			2.	Penetapan Tim Budaya Kerja (Agen Perubahan)	Dokumen	Jumlah dokumen Penetapan Tim Budaya Kerja (Agen Perubahan)	-	1	-	-	1	0	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
			3.	Sosialisasi Core Values ASN BerAKHLAK kepada Tim Agen Perubahan	Laporan	Laporan Sosialisasi Core Values ASN BerAKHLAK kepada Tim Agen Perubahan	-	-	-	1	1	Rp. 3.000.000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
			4.	Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK	ASN	Jumlah ASN yang di internalisasi	-	150	150	300	600	Rp. 1.000.000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat	87	1.	Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	Laporan	Jumlah Laporan evaluasi tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	-	-	-	1	1	Rp. -	Bagian Organisasi	Unit Kerja Penyelenggara publik (UKPP)
			2.	Sosialisasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ke UKPP	UKPP	Jumlah UKPP yang diberikan sosialisasi pelaksanaan SKM	-	16	-	-	16	Rp. 1.000.000	Unit Kerja Penyelenggara publik (UKPP)	Bagian Organisasi
			3.	Publikasi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024	UKPP	Jumlah UKPP yang dipublikasikan Hasil pelaksanaan SKM	-	-	-	16	16	Rp. 50.000.000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
			4.	Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 ke KemenPANRB	Laporan UKPP	Jumlah Laporan UKPP yang telah dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 ke KemenPANRB	-	-	-	1	1	0	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
	Indeks Pelayanan Publik	4.57	1.	Penetapan Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Dokumen	Jumlah dokumen Penetapan Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1	-	-	-	1	0	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi dan Bagian Hukum
			2.	Sosialisasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPV) Tahun 2024	OPD	Jumlah OPD yang mendapatkan sosialisasi	3	-	-	-	3	0	Bagian Organisasi	OPD Lokus
			3.	Pembekalan aspek evaluasi terhadap Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Orang	Jumlah Anggota Tim yang diberi pembekalan	-	22	-	-	22	Rp. 5.000.000	Bagian Organisasi	Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
			4.	Sosialisasi dan pembinaan penerapan aspek pelayanan prima terhadap Unit Kerja Lokus Evaluasi Tahun 2024	OPD	Jumlah OPD yang dibina	-	-	5	-	5	Rp. 15.000.000	Bagian Organisasi	Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
			5.	Profesionalisasi pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi (rekomendasi) terhadap Unit Kerja Lokus Evaluasi Tahun 2023	OPD	Jumlah OPD yang didampingi	-	-	3	-	3	Rp. 4.000.000	Bagian Organisasi	Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
			6.	Pelaksanaan Evaluasi Mandiri Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024	OPD	Jumlah OPD yang di evaluasi	-	-	5	-	5	Rp. 5.000.000	Bagian Organisasi	Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2024	NO	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Sehian	
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total		Koordinator	Pelaksana
			7.	Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut hasil evaluasi (rekomendasi) terhadap Unit Kerja Lokus Evaluasi Tahun 2023	OPD	Jumlah OPD yang dipantau	-	-	3	-	3	Rp. 2.000.000	Bagian Organisasi	Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
			8.	Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Mandiri Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik ke KemenPANRB	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Mandiri Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	-	-	-	3	3	0	Bagian Organisasi	Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik		82,23	1.	Pembinaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik ke Unit Lokus yang dinilai	UPP	Jumlah UPP yang dibina	3	4	-	-	7	Rp. 7.932.000	Bagian Organisasi	Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP)
			2.	Mengevaluasi kelengkapan dokumen dan data dukung UPP untuk penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Publik	UPP	Jumlah UPP yang di evaluasi terkait kelengkapan dokumen dan data dukung untuk penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Publik	-	7	-	-	7	0	Bagian Organisasi	Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP)



## b. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit Reformasi Birokrasi terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan 4 (empat) tema sebagai fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, yaitu :

### 1. Pengentasan Kemiskinan

Peran atau dukungan Reformasi Birokrasi Tematik pada isu tematik penanggulangan kemiskinan adalah dengan mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik agar besarnya anggaran kemiskinan berdampak optimal pada angka penurunan kemiskinan, melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat dalam penentuan sasaran ataupun penyediaan dukungan sarana dan prasarana, seperti penyediaan infrastruktur dan IT.

### 2. Peningkatan Investasi

Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi ini berperan dalam mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatnya indeks daya saing, melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran.

### 3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.

Digital Kultur diartikan sebagai pencapaian birokrasi yang memiliki mindset baru bahwa prioritas kerja adalah pada hasil (*outcome*). Digitalisasi administrasi pemerintahan akan di fokuskan dalam percepatan capaian penanganan stunting.

### 4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden.

Percepatan prioritas dan aktual presiden di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman difokuskan kepada tema "Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)" dan "Pengendalian Inflasi".

a. Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) akan mendorong penggunaan anggaran pemerintah yang tepat sasaran, efisien, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang jasa dan modal pemerintah .

b. Pengendalian Inflasi sebagai upaya dan inovasi pemerintah dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi daerah. Kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, serta bekerja sama antar daerah dalam menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok.

Adapun untuk Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2. RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK TAHUN 2024 PADA TEMA : "REALISASI INVESTASI"

No	Sasaran Roadmap	Indikator	Pernyataan	Sasaran	Indikator	Target 2024	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi* (terkait atau tidak terkait langsung)	Jumlah Anggaran	Perangkat		Ket	
								Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Tetal			Koordinator	Pelaksana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatnya nilai investasi	Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Belum ada kajian akademik terkait peluang investasi keterbatasan anggaran	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah bulan dan dokumen Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1. Membuat Peta Peluang Investasi	Peta Peluang Investasi	Jumlah Peta Peluang Investasi yang terwujud	0	0	1	0	1	terkait	Rp. 24.990.000	DPMPTP	DPMPTP		
			Kurang data potensi dan peluang investasi dan keterbatasan anggaran	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	100%	1. Melakukan Forum Investasi	Forum Investasi	Jumlah terlaksananya Forum investasi	0	1 forum	1	0	2x forum	terkait	Rp. 30.030.000	DPMPTP	DPMPTP		
			Kurangnya jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman	Meningkatkan umlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman	Jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman	5 Investor/ Pelaku Usaha	1. Memberikan Percepatan dan kemudahan bagi pelaku usaha / investor dalam pengurusan perizinan	Investor/ Pelaku Usaha	Jumlah investor yang diberikan fasilitas atau insentif Daerah	3	4	4	4	15	terkait	Rp. 5.000.000	DPMPTP	DPMPTP		
			Nilai investasi sektor Pariwisata perlu ditingkatkan	Meningkatnya nilai investasi sektor pariwisata	Persentase Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	75%	1. Peningkatan kolaborasi BUMD, perusahaan swasta, asosiasi pariwisata daerah dan pemerintah	Pemandatangan kerjasama investasi	Jumlah kerjasama investasi	Jumlah kerjasama investasi	1	1	2	3	7	Rp. 1.825.528.000	Disparpora	Seluruh Unit Kerja		



Tabel 2.3. KENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK TAHUN 2024 PADA TEMA : "DIGITALISASI PEMERINTAHAN (FOKUS PENANGANAN STUNTING)"

Tema	Sasaran Tematik Roadmap	Indikator	Target	No	Permasalahan (bottleneck)	Rencana	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi*)	Jumlah Anggaran	Unit/Setoran Kerja Pelaksanaan	
										Sasaran	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Digitalisasi Pemerintahan (Stunting)	Meningkatnya Efisiensi Data Base Stunting	Persentase keterisian data keluarga berisiko stunting	100%	1	Belum terdapatnya database keluarga berisiko stunting	Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting	1 Data	Menyediakan Data Base Keluarga Berisiko Stunting	1 Data	Jumlah Data Keluarga Berisiko Stunting	-	-	-	1 Data	1 Data	Melakukan Pendataan Keluarga Berisiko Stunting		Bapelitbangda	DPPKS
																Mengumpulkan data keluarga berisiko stunting				
																Melakukan verifikasi data keluarga berisiko stunting				
				2	Belum terdapatnya Data Ca/In/Ca/In PUS 3 (tiga) bulan sebelum melahirkan dan Pengisian ca/In/Ca/In PUS dengan Pemeriksaan Kesehatan	Ca/In/CA/US	Jumlah Ca/In/Ca/In PUS 3 (tiga) bulan sebelum melahirkan dan Pengisian ca/In/Ca/In PUS dengan Pemeriksaan Kesehatan	1 Data	Menyediakan Data Ca/In/Ca/In PUS 3 (tiga) bulan sebelum melahirkan dan Pengisian ca/In/Ca/In PUS dengan Pemeriksaan Kesehatan	1 Data	Jumlah Data Ca/In/Ca/In PUS 3 (tiga) bulan sebelum melahirkan dan Pengisian ca/In/Ca/In PUS dengan Pemeriksaan Kesehatan	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	Melakukan pendataan Data Ca/In/Ca/In PUS 3 (tiga) bulan sebelum melahirkan		Bapelitbangda	Dinas Kesehatan DPPKB
																Melakukan pendataan Ca/In yang terverifikasi secara				
																Menyediakan data status gizi Ca/In/Ca/In (kurus 18,4-19,9, Normal 18,5-25, Gemuk > 25				
				3	Belum terdapatnya data Ibu Hamil	Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil	1 data	Menyediakan Data Ibu Hamil	1 Data	Jumlah data Ibu Hamil	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	Melakukan Pendataan Ibu Hamil	1.913.558.200	Bapelitbangda	Dinas Kesehatan
																Melakukan pendataan Ibu hamil dengan 4 T ( Terlalu Muda, < 19 Tahun, Terlalu Tua > 35 Tahun, Terlalu dekat < 24 bulan, Terlalu banyak > 2 anak )				
																Melakukan pendataan Ibu hamil dengan anemia				
																Melakukan pendataan Ibu hamil KEK				
																Melakukan pendataan Ibu hamil dengan pertumbuhan janin terhambat ( NJT )				
				4	Belum terdapatnya data PUS Pasca Persalinan dan Masa Interval yang terupdate	Ibu pasca persalinan	Jumlah ibu yang belum menggunakan KB Pasca Persalinan	1 data	Menyediakan data ibu yang belum menggunakan KB Pasca Persalinan	1 Data	Jumlah data Ibu yang belum menggunakan KB Pasca Persalinan	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	Melakukan pendataan Ibu yang belum menggunakan KB Pasca Persalinan	97.000.000	Bapelitbangda	Dinas Kesehatan
				6	Belum terdapatnya data anak usia 0-23 bulan	Anak usia 0-23 bulan	Jumlah anak usia 0-23 bulan	1 data	Menyediakan data anak usia 0-23 bulan	1 Data	Jumlah data anak usia 0-23 bulan	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	Melakukan pendataan anak usia 0-23 bulan	63.796.400	Bapelitbangda	Dinas Kesehatan
																Melakukan pendataan anak 0 bulan dengan berat badan < 3.500 gram				
																Melakukan pendataan anak 0 bulan dengan panjang badan <48 cm				
																Melakukan pendataan anak 0-6 bulan yang menerima ASI Eksklusif				
																Melakukan pendataan anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan MP ASI				
																Melakukan pendataan anak 0-23 bulan dengan diare kronis				
																Melakukan pendataan anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang				
																Melakukan pendataan anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk				

						Jumlah anak usia 0-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	1 data	Menyediakan data anak usia 0-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	1 Data	Jumlah anak usia 0-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	Melakukan pendataan anak usia 0-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				
						Jumlah anak usia 0-23 bulan yang diukur berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standar	1 data	Menyediakan data anak usia 0-23 bulan yang diukur berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standar	1 Data	Jumlah anak usia 0-23 bulan yang diukur berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standar	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	Melakukan pendataan anak usia 0-23 bulan yang diukur berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standar				
						Jumlah anak usia 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standar	1 data	Menyediakan data anak usia 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standar	1 Data	Jumlah anak usia 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standar	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	Melakukan pendataan anak usia 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standar				
			7	Belum terdapatnya data anak usia 24-59 bulan	Anak usia 24-59 bulan	Jumlah anak usia 24-59 bulan	1 data	Menyediakan data anak usia 24-59 bulan	1 Data	Jumlah anak usia 24-59 bulan	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	Melakukan pendataan anak usia 24-59 bulan				
						Jumlah anak usia 24-59 tahun dengan diare kronis	1 data	Menyediakan data anak usia 24-59 tahun dengan diare kronis	1 Data	Jumlah anak usia 24-59 tahun dengan diare kronis	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	Melakukan pendataan anak usia 24-59 tahun dengan diare kronis				
						Jumlah anak usia 24-59 bulan dengan gigi kurang	1 data	Menyediakan data anak usia 24-59 bulan dengan gigi kurang	1 Data	Jumlah anak usia 24-59 bulan dengan gigi kurang	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	Melakukan pendataan anak usia 24-59 bulan dengan gigi kurang				
						Jumlah anak usia 24-59 bulan dengan gigi buruk	1 data	Menyediakan data anak usia 24-59 bulan dengan gigi buruk	1 Data	Jumlah anak usia 24-59 bulan dengan gigi buruk	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	Melakukan pendataan anak usia 24-59 bulan dengan gigi buruk				
						Jumlah anak usia 24-59 bulan yang diukur berat badan dan tinggi badan sesuai standar	1 data	Menyediakan data anak usia 24-59 bulan yang diukur berat badan dan tinggi badan sesuai standar	1 data	Jumlah anak usia 24-59 bulan yang diukur berat badan dan tinggi badan sesuai standar	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	Melakukan pendataan anak usia 24-59 bulan yang diukur berat badan dan tinggi badan sesuai standar				
						Jumlah anak usia 24-59 bulan yang dipantau perkembangan sesuai standar	1 data	Menyediakan data anak usia 24-59 bulan yang dipantau perkembangan sesuai standar	1 data	Jumlah anak usia 24-59 bulan yang dipantau perkembangan sesuai standar	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	Melakukan pendataan anak usia 24-59 bulan yang dipantau perkembangan sesuai standar				
			8	Belum terdapatnya data keluarga pra-sejahtera penerima program bantuan sosial	Keluarga Pra Sejahtera	Jumlah keluarga pra-sejahtera penerima program bantuan sosial	1 data	Menyediakan data keluarga pra-sejahtera penerima program bantuan sosial	1 data	Jumlah data keluarga pra-sejahtera penerima program bantuan sosial	-	-	-	1 data	1 data	Melakukan pendataan keluarga pra-sejahtera penerima program bantuan sosial	30.000.000	Bapelitbangda	DinasP3A	
						Jumlah KPM dengan ibu hamil, ibu menyusui, anak berusia 2 tahun yang menerima variabel bantuan pangan selain beras dan telur	1 data	Menyediakan data KPM dengan ibu hamil, ibu menyusui, anak berusia 2 tahun yang menerima variabel bantuan pangan selain beras dan telur	1 data	Jumlah data KPM dengan ibu hamil, ibu menyusui, anak berusia 2 tahun yang menerima variabel bantuan pangan selain beras dan telur	1 data	1 data	1 data	1 data	4 data	Melakukan pendataan KPM dengan ibu hamil, ibu menyusui, anak berusia 2 tahun yang menerima variabel bantuan pangan selain beras dan telur		Bapelitbangda	DinasP3A	
						Jumlah PUS pra-sejahtera yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	1 data	Menyediakan data PUS pra-sejahtera yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	1 data	Jumlah data PUS pra-sejahtera yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	1 data	1 data	1 data	1 data	4 data	Melakukan pendataan PUS pra-sejahtera yang memperoleh bantuan tunai bersyarat		Bapelitbangda	DinasP3A	
						Jumlah PUS Pra-sejahtera yang memperoleh Bantuan Pangan Mitigasi Risiko Pangan (MRP)	1 data	Menyediakan data PUS Pra-sejahtera yang memperoleh Bantuan Pangan Mitigasi Risiko Pangan (MRP)	1 data	Jumlah data PUS Pra-sejahtera yang memperoleh Bantuan Pangan Mitigasi Risiko Pangan (MRP)	1 data	1 data	1 data	1 data	4 data	Melakukan pendataan PUS Pra-sejahtera yang memperoleh Bantuan Pangan Mitigasi Risiko Pangan (MRP)		Bapelitbangda	DinasP3A	
						Jumlah PUS Pra-sejahtera yang memperoleh Penyerapan Bantuan Iuran (PBI)	1 data	Menyediakan Data PUS Pra-sejahtera yang memperoleh Penyerapan Bantuan Iuran (PBI)	1 data	Jumlah PUS Pra-sejahtera yang memperoleh Penyerapan Bantuan Iuran (PBI)	-	-	-	1 data	1 data	Melakukan pendataan PUS Pra-sejahtera yang memperoleh Penyerapan Bantuan Iuran (PBI)		Bapelitbangda	DinasP3A	



				9	Belum terdapat data keluarga yang memiliki Remaja, Ibu Hamil, Ibu Menyusui yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap akses air minum layak	Keluarga yang memiliki Remaja, Ibu Hamil, Ibu Menyusui yang memiliki anak usia 0-23 bulan	Jumlah keluarga yang memiliki Remaja, Ibu Hamil, Ibu Menyusui yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap akses air minum layak	1 data	Menyediakan data keluarga yang memiliki Remaja, Ibu Hamil, Ibu Menyusui yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap akses air minum layak	1 data	Jumlah keluarga yang memiliki Remaja, Ibu Hamil, Ibu Menyusui yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap akses air minum layak	1 data	1 data	1 data	1 data	1 data	Melakukan pendataan keluarga yang memiliki Remaja, Ibu Hamil, Ibu Menyusui yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap akses air minum layak	7.200.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
				10	Belum terdapat data keluarga yang memiliki Remaja, Ibu Hamil, Ibu Menyusui yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan	Keluarga yang memiliki Remaja, Ibu Hamil, Ibu Menyusui yang memiliki anak usia 0-23 bulan	Jumlah keluarga yang memiliki Remaja, Ibu Hamil, Ibu Menyusui yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan	1 data	Menyediakan data keluarga yang memiliki Remaja, Ibu Hamil, Ibu Menyusui yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan sarana rumah	1 data	Jumlah keluarga yang memiliki Remaja, Ibu Hamil, Ibu Menyusui yang memiliki anak usia 0-23 bulan	1 data	1 data	1 data	1 data	4 data	Melakukan pendataan keluarga yang memiliki Remaja, Ibu Hamil, Ibu Menyusui yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan		Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
				11	Belum terdapat data keluarga yang memiliki Remaja, Ibu Hamil, Ibu Menyusui yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan Jamban Sehat	Keluarga yang memiliki Remaja, Ibu Hamil, Ibu Menyusui yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan Jamban Sehat	Jumlah keluarga yang memiliki Remaja, Ibu Hamil, Ibu Menyusui yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan Jamban Sehat	1 data	Menyediakan Data keluarga yang memiliki Remaja, Ibu Hamil, Ibu Menyusui yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan Jamban Sehat	1 data	Jumlah keluarga yang memiliki Remaja, Ibu Hamil, Ibu Menyusui yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan Jamban Sehat	1 data	1 data	1 data	1 data	4 data	Melakukan pendataan keluarga yang memiliki Remaja, Ibu Hamil, Ibu Menyusui yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan Jamban Sehat		Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
				12	Belum terdapat data Nagari Prioritas Stunting	Nagari	Jumlah Nagari Bebas Stunting	1 data	Menyediakan data Nagari bebas Stunting	1 data	Jumlah Nagari Bebas Stunting						Melakukan pemetaan nagari bebas stunting	10.000.000	DPMD	DPMD
				13	Pemutakhiran data surveillance keluarga beresiko stunting	Keluarga Beresiko Stunting	Jumlah pemutakhiran data surveillance keluarga beresiko stunting yang terpenuhi	1 data	Menyediakan pemutakhiran data surveillance keluarga beresiko stunting	1 data	Jumlah pemutakhiran data surveillance keluarga beresiko stunting	-	1 data	-	-	1 data	Melakukan pemutakhiran data surveillance keluarga beresiko stunting	3.915.983.530	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
				14	Belum terdapat data terintegrasi secara digital sebagai basis data stunting	Data terintegrasi secara digital sebagai basis data stunting	Jumlah data terintegrasi secara digital sebagai basis data stunting	1 data digital	Menyediakan data terintegrasi secara digital sebagai basis data stunting	data digital	Jumlah data terintegrasi secara digital sebagai basis data stunting	-	-	-	1 data digital	1 data digital			Bapelbangda dan Diakominfo	Bapelbangda dan Diakominfo
Meningkatkan Kualitas Penanganan Stunting	Prevalensi Stunting	16%	1	Belum maksimalnya pendampingan keluarga beresiko stunting	Keluarga Beresiko Stunting	Persentase Keluarga Beresiko Stunting Yang memperoleh Pendampingan	100%	Melakukan Pendampingan kepada Keluarga Beresiko Stunting	%	Persentase Keluarga Beresiko Stunting Yang memperoleh Pendampingan	-	73%	90%	100%	100%	Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di wilayah Nagari Melakukan orientasi kepada TPK tentang Stunting Melakukan KIE kepada keluarga beresiko stunting oleh TPK	40.000.000	DPKKB	DPKKB	
								Melakukan Pendampingan kepada Remaja	%	Persentase Remaja Putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	-	-	-	90%	90%	Melakukan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) kepada Remaja Putri Melakukan pemantauan Hb pada remaja putri penderita Anemia	3.915.983.530	Dinas Kesehatan	Puskemas	
								Melakukan pembinaan kepada Remaja melalui kelompok Bina Keluarga Remaja	%	Persentase Kelompok Remaja yang di Bina	-	-	-	80%	80%	Pengisian Bahan Habis Pakal ( Strip Hb, alat ukur swab dan blood smear ) untuk skrining anemia pada remaja putri	3.000.000.000	Dinas Kesehatan	Instansi Partner Dinas Kesehatan	
									%	Persentase yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peruli Remaja (PKPR)	-	-	-	90%	90%	Melakukan Edukasi Kesehatan Reproduksi kepada Remaja Putri				
									%	Persentase Sekolah Melaksanakan UKS/M	-	-	-	90%	90%					
									%	Persentase Sekolah Melaksanakan Screening Kesehatan	-	-	-	90%	90%					

										%	Perentase Selesai Melaksanakan Screening Anemia				90%	90%					
										%	Perentase Remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan Remaja & Perempuan Terintegrasi	20	20	20	20	100	Melakukan kegiatan Penderita Terintegrasi				
										%	Melakukan pendampingan kepada Ibu hamil	100	100	100	100	100	Melakukan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil sesuai standar Melakukan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) kepada ibu hamil Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KKK melakukan tetakan kesehatan kepada ibu hamil dengan Perencanaan Jenis Tersebut (PJT)	1.913.518.200	Dasar Kesehatan	Pelayanan	
										%	Melakukan Pendampingan kepada Ibu Pasa Salin	80	80	80	80	80	Melakukan pelayanan kesehatan kepada ibu bersalin sesuai standar Melakukan kegiatan KB Pasa salin	97.000.000	Dasar Kesehatan	Pelayanan	
										%	Melakukan pendampingan kepada PUS yang ingin melakukan pemantauan kehamilan dan tidak ingin punya anak lagi						Swaklasia dan pembiayaan Fasilitas tenaga pelayanan KB  Pelayanan Ginem & Fasilitas Kesehatan Pemberian edukasi dan fasilitas terkait kesehatan akseptor KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Fasilitas Pelayanan PUS untuk ber KB		DPPKB	DPPKB	
										%	Melakukan pendampingan keluarga dengan anak usia 0-23 bulan	100	100	100	100	100	Melakukan pendampingan kepada keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan pendampingan	63.796.400	Dasar Kesehatan	Pelayanan	
											Perentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan berat badan < 2500 gram yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi	100	100	100	100	100	Melakukan tatalaksana kesehatan dan gizi kepada keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan berat badan < 2500 gram				
											Perentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang 48 cm yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi	100	100	100	100	100	Melakukan tatalaksana kesehatan dan gizi kepada keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang 48 cm				
											Perentase keluarga dengan anak usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif	100	100	100	100	100	Melakukan pemberian ASI Eksklusif kepada keluarga dengan anak usia 0-6 bulan				
											Perentase keluarga dengan anak 0-23 bulan yang mendapatkan MP ASI	100	100	100	100	100	Melakukan pemberian MP ASI kepada keluarga dengan anak usia 0-23 bulan				









							Melakukan fasilitas kepada keluarga pra-wajihers berisiko stunting yang menerima bantuan sosial	%	Cakupan keluarga pra-wajihers berisiko stunting penerima bantuan sosial	20	30	20	30	100	Pemberian bantuan perlindungan sosial kepada keluarga pra-wajihers berisiko stunting		Dinas Sosial P3A	Dinas Sosial P3A
									Cakupan keluarga pra-wajihers penerima manfaat nilai bantuan pangan selain beras dan telur	20	30	20	30	100	Pemberian bantuan pangan selain beras dan telur keluarga pra-wajihers berisiko stunting		Dinas Sosial P3A	Dinas Sosial P3A
									Cakupan PUS Mikin yang memperoleh bantuan tunai berprestasi	20	30	20	30	100	Pemberian bantuan tunai berprestasi kepada PUS Mikin		Dinas Sosial P3A	Dinas Sosial P3A
									Cakupan PUS yang memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	20	30	30	30	100	Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada PUS		Dinas Sosial P3A	Dinas Sosial P3A
									Cakupan PUS selain yang memperoleh Penerima Bantuan	20	30	20	30	100	Pemberian Jaminan Sosial Penerima Bantuan Jaminan (PBJ) kepada PUS		Dinas Sosial P3A	Dinas Sosial P3A
							Melakukan pendampingan Calon Pengantin Calon Pasangan usia subur (PUS)	%	Cakupan Calon/CalPUS 3 (tiga) bulan sebelum menikah	100	100	100	100	100	Melakukan pendampingan kepada Calon/Cal PUS 3 bulan sebelum menikah		Dinas Kesehatan	Puskesmas
									Melakukan edukasi kepada Calon/CalPUS tentang stunting	100	100	100	100	100	Melakukan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) kepada Calon/CalPUS yang anemia		Dinas Kesehatan	Puskesmas
									Perentase Calon/CalPUS anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD)	100	100	100	100	100	Melakukan pelaksanaan keehatan dan gizi kepada Calon/CalPUS			
							Melakukan pengembangan Pendidikan PAUD HI	%	Perentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	25	25	25	25	100	Melakukan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Melakukan Audit Kasus Stunting	Angka	Jumlah Tim Audit Stunting				1	1	Melakukan pembentukan Tim Audit Stunting		DPPKB	DPPKB
								%	Perentase pelaksanaan audit kasus stunting dan manajemen pendampingan				50	100	Melaksanakan audit stunting		DPPKB	DPPKB
								%	Perentase tindak lanjut hasil audit kasus stunting dan manajemen pendampingan	50			50	100	Melakukan tindak lanjut berbagai kegiatan audit kasus stunting		DPPKB	DPPKB
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat	Perentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100%	Kurangnya Kemandirian Masyarakat untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga berisiko stunting	Perentase PHBS	100%	Melakukan peningkatan akses air minum layak bagi keluarga berisiko stunting	%	Perentase keluarga berisiko stunting yang mengakses air minum layak	25	25	25	25	100	Melakukan pembuatan SPAN		PUPR	Dinas Kesehatan
									Melakukan penelitan Laboratorium Kualitas Air Minum							Dinas Kesehatan	UPT Labkuda	

								Melakukan peningkatan promosi jamban sehat bagi keluarga berisiko stunting	%	Perentase keluarga berisiko stunting yang mempunyai jamban sehat	35	35	35	35	100	Melakukan promosi Jamban Sehat untuk Keluarga Berisiko Stunting  Melakukan Promosi Bantuan Total Berisiko Masyarakat (BTBM)	811.300.000	Dinas Kesehatan	Pokremas	
								Melakukan perubahan jumlah layak bagi Keluarga Berisiko Stunting	%	Perentase rumah layak huni	35	35	35	35	100	Melakukan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		DLHKPP	DLHKPP	
								Melakukan pembentukan Dapur Gid keluarga di desa prioritas stunting berisiko pangan lokal	%	Perentase desa prioritas yang melaksanakan dapur gid keluarga berisiko pangan lokal	35	35	35	35	100	Melakukan pembentukan Pos Gid di setiap nagari		DPMD	DPMD	
								Melakukan pemantauan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat kepada Keluarga Berisiko stunting	%	Perentase PHBS	35	35	35	35	100	Melakukan pemantauan Tatanan Kemas Tanpa Rakuk	1.382.468.918	Dinas Kesehatan	Pokremas	
											35	35	35	35	100	Melakukan pemantauan Kemas Tanpa Rakuk				
											35	35	35	35	100	Melakukan Promosi kepada masyarakat tentang PHBS Tatanan Rumah Tangga melalui TP PKR dan Daurwama				
											35	35	35	35	100	Melakukan penyuluhan tentang konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman				
											35	35	35	35	100	Melakukan kampanye OERMAS (Orakan Akai Bergizi, Cegah Stunting dan Kurikan Penderita) di seluruh Kecamatan				
								Sesialisasi Gerakan Makan Ikan (Gemar Ikan)	Orang	Jumlah peserta sosialisasi Gerakan Makan Ikan (Gemar Ikan)	76	orang			76	orang	Memberikan edukasi kepada murid TK tentang pentingnya ikan untuk kesehatan tubuh dan kecerdasan otak Memberikan makanan tambahan berbahan ikan Ikan kepada murid TK peserta sosialisasi Gerakan Makan Ikan (Gemar Ikan dan) Mendiskusikan cara pengolahan makanan berbahan ikan kepada orang tua murid TK	440.937.000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
								Pemberian Paket Bantuan Baidaya Ikan dalam Ember	Unit	Jumlah Paket Bantuan Baidaya Ikan dalam Ember	156	paket			156	paket	Memberikan paket bantuan bahan ikan, benih dan pakan ikan ke keluarga berisiko di desa prioritas dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan perikanan untuk mendukung peningkatan konsumsi gizi keluarga melalui protein dari ikan	440.937.000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan



Tabel 2.4. RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK TAHUN 2024 PADA TEMA : "PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI"

No.	Sasaran Roadmap	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat / stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
								Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total			Koordinator	Pelaksana
1.	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tingkat Nilai Penggunaan Produk Dalam Negeri	Belum tercapainya target minimal penggunaan dalam negeri	Perangkat Daerah yang masih melaksanakan pengisian barang dan jasa secara manual atau belum aplikasi secara e-procurement	Tingkat Nilai Penggunaan Produk Dalam Negeri	70%	1. Mengeluarkan surat edaran peningkatan Penggunaan PDN	Surat	Jumlah surat edaran peningkatan penggunaan PDN	1	-	-	-	1	Terkait	2.000.000	UKPSJ	Seluruh OPD
							2. Memperbanyak jumlah etalase produk di katalog	etalase produk	Jumlah etalase produk yang diperbanyak	1	1	1	-	3	Tidak terkait	2.000.000	UKPSJ	Penyedia Jasa
							3. Memberikan akses informasi produk dalam negeri kepada seluruh OPD terkait	OPD	Jumlah Perangkat Daerah yang diberikan akses informasi produk dalam negeri	43	-	-	-	43	Terkait	2.000.000	UKPSJ/Dinas/kerkop	UKPSJ/Seluruh OPD
							4. Melakukan Koordinasi dan Pembinaan terkait Peningkatan Penggunaan PDN	Kegiatan	Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan terkait peningkatan penggunaan PDN	1	1	1	1	4	Terkait	2.000.000	UKPSJ	UKPSJ/OPD

Tabel 2.5. RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK TAHUN 2024 PADA TEMA : "PENGENDALIAN INFLASI"

No	Sasaran Roadmap	Indikator	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat / stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/satuan kerja pelaksana	
								Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total			Koordinator	Pelaksana
1	Menurunnya angka inflasi	Nilai Inflasi	Pengendalian inflasi yang tidak stabil	Ketersediaan stok kebutuhan barang pokok sehari-hari	Nilai Inflasi	Menurunnya nilai inflasi pada periode sebelumnya	1. Mengadakan bazar dan gerakan pasar murah	Kegiatan	Jumlah kegiatan bazar dan gerakan pasar murah yang dilaksanakan	1	1	1	1	4	terkait	-	Perekonomian dan SDA	Diadagnakerkop & UKM, DistanKP, Disakdeswan dan Dis. Perikanan
							2. Menyusun Laporan Pengendalian inflasi per triwulan	Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian Inflasi Per Triwulan yang disusun	1	1	1	1	4	terkait	-	Perekonomian dan SDA	Diadagnakerkop & UKM, DistanKP, Disakdeswan dan Dis. Perikanan

PARAF KOORDINASI  
**SEKDA**  
 KA.SKPD/ASISTEN  
 KABAG.HUKUM

BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
 SUHATRI BUR